

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari keingintahuan untuk mempelajari dan menjelaskan beberapa pertanyaan yang muncul sebagai sebuah hal yang fenomenal dalam masyarakat. *Pertama*, bagaimana implikasi politik di terapkannya pemilihan Presiden/Wakil Presiden langsung dalam pemilu 2004 mendatang di tingkat nagari. dengan banyaknya muncul partai politik baru pada pemilu 1999 dan menjelang pemilu 2004 muncul pertanyaan *kedua*, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemenangan suatu partai politik. Dan *ketiga*, Strategi apa yang harus dilakukan oleh partai politik untuk memaksimalkan perolehan dukungan suara tersebut di nagari.

Untuk memberikan kejelasan dalam menganalisa dan menjawab permasalahan di atas, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) yang respondennya ditetapkan secara purposif yaitu fungsionaris partai politik dan tokoh-tokoh di dua nagari dianalisa dengan teknis deskriptif-analitis.

Dalam penelitian ini ditemukan adanya kesamaan strategi dari partai politik dalam meraih dukungan masyarakat pada pemilu yang lalu seperti mengandalkan pada figur seseorang, materi kampanye, dan penggunaan media dan mekanisme untuk menggiring massa pemilih. Tentunya, kesamaan strategi ini bukanlah sesuatu yang 'dilarang'. Akan tetapi dengan perubahan perilaku politik masyarakat yang semakin tercerahkan, pola seperti ini menjadi tidak signifikan. Sudah saatnya partai politik memiliki "*trade mark*" sendiri dalam melahirkan strateginya pada pemilu 2004.

Kata kunci: *Strategi partai, pemilih rasional, dan dukungan pada partai politik*

I. PENDAHULUAN

Pemaknaan hakikat kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh UUD 1945 sudah dirasakan pada tataran empiris. Terbukti dengan semakin maraknya keinginan masyarakat untuk mendirikan partai politik atau paling tidak ikut serta dalam partai politik. Ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah negara yang mengaku demokratis. Dimana negara menjamin kebebasan, berserikat dan berkumpul individu warga negaranya (Dahl, 2001: 49-85 Terjemahan). Inilah konkretisasi dari sebuah demokrasi mayoritas (*majority democracy*) untuk berekspresi dalam politik. Namun persoalannya akan muncul, ketika kehadiran banyak partai ternyata tidak diiringi dengan kemampuannya untuk meraih dukungan (*partisanship*) dari masyarakat pemilih (*voter*). Dan ini harus menjadi perhatian serius partai mengingat hidup-matinya partai ada di tangan masyarakat.

Namun, dibalik semakin maraknya komunitas politik mendirikan partai politik berdampak pula pada eksistensi partai politik setelah berdiri. Dan ini relevan dengan upaya sebuah partai politik dalam menggalang basis dukungannya. Basis dukungan yang merupakan konstituen dalam pemilihan umum menjadi signifikan guna mempertahankan kehadiran partai politik dalam sistem politik suatu negara.

Perubahan konfigurasi politik dalam skala nasional juga berdampak pada gradasi lokal. Misalnya, dengan diterapkannya pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung pada pemilu 2004 yang diikuti dengan modifikasi sistem pemilihan umum yang digunakan tahun 1999 pada akhirnya akan memposisikan masyarakat pada subyek politik yang determinan. Ini berarti, perubahan atas *electoral law* (hukum pemilihan) yang dilakukan oleh pemerintah akan bermuara pada *electoral process* (pelaksanaan pemilihan). Dengan demikian diharapkan fenomena ini akan melahirkan tatanan politik dalam masyarakat baik *level* nasional ataupun lokal yang lebih demokratis, dimana partisipasi masyarakat terus meningkat.

Sesungguhnya, model kehidupan masyarakat yang demokratis di gradasi lokal sudah dikenal sejak lama di Sumatera Barat. Konsep ini dengan sebutan "nagari". Konsep ini merefleksikan, *pertama*, adanya pemerintahan nagari dalam kehidupan masyarakat terbawah merupakan representasi kehidupan politik masyarakat yang lebih demokratis. Ini berkaitan dengan meluasnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik di tingkat bawah (*grassroots*). *Kedua*, pemerintahan nagari ditinjau dari sudut filosofis dan normatif merupakan perwujudan dan aktualisasi nilai-nilai adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Minang modern. *Ketiga*, alasan yang lebih praktis bahwa pemerintahan nagari memberi kesempatan pada masyarakat untuk bersama-sama menjalankan fungsi pemerintahan yakni pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan di nagarinya. Sebab selama ini dianggap bahwa pemerintahan desa belum mampu menyerap aspirasi masyarakat di tingkat bawah.

Pada masa Pemerintahan Orde Baru terjadi rekayasa politik besar dalam menempatkan masyarakat sebagai pemilih. Secara geografis, masyarakat rural ditabukan untuk berpolitik. Masyarakat hanya diorientasikan untuk mampu memproduksi secara ekonomi, paling tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Melalui kebijakan depolitisasi massa dan *floating mass*, Orde Baru melanggengkan kekuasaannya (Mas'ood, 1989: 19-26). Mesin politik pemerintah yaitu Golkar di format menjadi partai yang hegemoni untuk mencari legitimasi kekuasaan yang dimiliki Pemerintah Orde Baru. Akibatnya partai-partai lain menjadi kerdil dan tak berdaya.

Kebijakan lain yang juga berdampak pada kehidupan politik masyarakat adalah rekayasa pemilu yang menguntungkan partai pemerintah yaitu Golkar. Rekayasa yang dimaksudkan disini mengarah pada pembentukan opini publik tentang program-program pemerintah yang dianggap berhasil yang dikomunikasikan melalui Golkar. Pada pelaksanaan pemilu pun berlangsung mobilisasi massa yang "memaksa" masyarakat beramai-ramai memilih Golkar. Manipulasi suara pemilih pun dijadikan salah satu strategi guna menyingkirkan pesaing partai pemerintah ini. Pesaing Golkar yaitu PPP dan PDI "di bonsai" melalui kebijakan fusi partai tahun 1973 sehingga menimbulkan konflik internal di tubuh partai tersebut. Intervensi dan Pengaturan kehidupan politik dari Departemen Dalam Negeri mempengaruhi kinerja dan prestasi partai dalam perolehan suara pemilu berikutnya (Liddle, 1994: 17-31)

Dengan kondisi seperti disebutkan di atas, maka penelitian ini, akan melihat relevansi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004 nanti dengan strategi maksimalisasi perolehan dukungan (*partisanship*) dari partai politik. Pertarungan dalam mencari dukungan pemilih akan menguat menjelang pemilu 2004. Menguatnya dukungan tersebut justru terjadi di tingkat masyarakat bawah yaitu nagari. Pada lapisan inilah partai berupaya maksimal mensosialisasikan program, *platform*, kebijakan dan strategi partai politik (Klingemann et.al, 2000: 391-443. terjemahan). Khusus di Indonesia menjelang pemilu 2004 nanti, kehadiran banyak partai politik di pentas politik nasional menjadi fenomena tersendiri yang menarik untuk dianalisa. Transisi menuju demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia ini juga menyentuh entitas masyarakat seperti di nagari.

II. PERUMUSAN MASALAH

Tentunya, untuk meraih dukungan maksimal dalam pemilu sebuah partai politik harus mengetahui psikologi massa yang dihadapinya dan mengetahui karakteristik daerah yang dijadikan target perolehan suara. Bagaimana partai politik menyusun strategi dalam mencari dukungan publik serta upaya mereka memenangkan pemilihan umum di nagari-nagari yang notabeneanya akan menjadi *domain* politik baru, idealnya harus dimulai dengan suatu kajian ilmiah yang komprehensif dengan menjawab beberapa pertanyaan mendasar: *Pertama*, Bagaimana implikasi politik pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung yang diterapkan di Nagari? *Kedua*, Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi kemenangan suatu partai politik dalam pemilu tersebut? *Ketiga*, Strategi apa yang harus dilakukan oleh partai politik untuk memaksimalkan perolehan dukungan massa pemilih.?

III. TINJAUAN PUSTAKA

Seyogyanya, dukungan suara dari pemilih (*voter*) harus selalu menjadi patokan partai politik guna keberhasilannya dalam meraih kekuasaan. Oleh karenanya, guna pencapaian dukungan yang maksimal dari masyarakat pemilih partai politik tidak mesti menyusun strategi di saat pemilu akan berlangsung. Tapi, sudah harus mulai tatkala partai tersebut dideklarasikan. Kalkulasi dukungan yang akan diperoleh dan upaya mencari simpati masyarakat pemilih dapat dilakukan dari awal dengan cara, *pertama*, menetapkan siapa konstituen yang akan diraih dengan kehadiran partai tersebut. Sebab, dukungan konstituen merupakan wujud nyata dukungan politik yang secara kuantitas merupakan sebuah fakta politik guna memperoleh kekuasaan. Dalam demokrasi

mayoritas dukungan ini menjadi sangat krusial. Partai politik, harus bisa memahami karakteristik konstituen mereka. Karakteristik itu akan tercermin dalam garis ideologi partai yang ditetapkan. Partai harus dapat memahami *trend* yang berlangsung dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan ideologi (Niemi and Weisberg, 1984: 319-28) Yang jelas adalah dengan banyaknya pilihan ideologi dalam masyarakat, menyebabkan terjadinya polarisasi ideologi. Oleh karenanya, sebuah partai harus mengetahui kondisi ini jika mereka ingin eksis dalam sistem politik.

Kedua, konsekuensi dari pendidikan politik (*civic education*) yang terus dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, kalangan pemerintah, dan lembaga mahasiswa menggeser cara berpikir masyarakat menjadi pemilih yang rasional (*rational voter*). Salah satu ciri pemilih yang rasional adalah mereka memiliki banyak preferensi dalam melakukan *voting*. Bagi masyarakat, salah satu yang mendasari pilihan mereka nantinya adalah orientasi mereka terhadap isu-isu yang diketengahkan oleh sebuah partai politik (Carmines and Stimson, 1984: 164-81).

Fenomena ini dapat dilihat dengan *statement* fungsionaris partai pada saat yang penting dalam melihat masalah sosial kemasyarakatan. Bagi partai politik ini menjadi strategi yang tepat jika ingin mencari simpati masyarakat dengan mengemas isu-isu yang bersinggungan dengan kenyataan hidup dan yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, isu-isu tersebut memungkinkan untuk menjadi sebuah kebijakan partai. Biasanya pada masyarakat yang rasional, penilaian terhadap isu-isu yang diketengahkan sebuah partai politik dapat dilihat dalam jabaran *platform* partai tersebut. Ini bukanlah perkara mudah bagi partai baru. Sebab, ada kecenderungan umum ditemukan bahwa *platform* partai disusun terlalu normatif sehingga sulit untuk dijabarkan dalam realitas politik masyarakat. Dan ini terbukti, selama pemilu dilaksanakan sangat jarang partai dapat merealisasikan isu-isu kampanye yang pernah dikemasnya.

Ketiga, dukungan suara bisa diperoleh sebuah partai politik berdasarkan kandidat presiden atau kandidat anggota parlemen yang dimunculkannya. Jelas, dalam masyarakat yang rasional orientasi terhadap kandidat akan menyertai pilihan mereka. Bagi bangsa Indonesia proses ini akan menjadi penting pada pemilu 2004 nantinya. Hal ini terkait dengan telah disepakatinya amandemen ke-3 pasal 6A UUD 1945 tentang pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakat. Ini berarti, partai politik atau gabungan beberapa partai politik akan mengajukan paket nama presiden/wakil presiden untuk dipilih secara langsung oleh rakyat pemilih. Namun, satu hal yang harus menjadi perhatian partai dalam mengusulkan nama kandidat presiden/wakil presiden adalah popularitas mereka di tingkat lokal. Ini menjadi krusial, karena tidak semua tokoh nasional populer di tingkat lokal. Partai dapat saja merefleksikan figur kandidatnya mulai dari sekarang (Imawan, 1998: 27-32). Ini tentunya berkaitan dengan opini publik yang terbentuk dan penilaian terhadap sikap resistensi yang akan diberikan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu partai politik dapat meninjau kembali kandidatnya.

Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai *floating mass* selama ini berakibat buruk terhadap pola partisipasi politik masyarakat. Nuansa kebijakan ini dapat dirasakan seiring dengan pemberlakuan UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Konsekuensi logis dari implementasi UU No.5 tahun 1979 ini melunturkan nilai-nilai masyarakat lokal dimana nilai-nilai adat istiadat masyarakat lokal "harus lebur" dengan nilai-nilai kebangsaan (*nation character building*) yang dikenalkan *incumbet regime*. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilu selama ini hanya suatu upaya pemerintah untuk menutupi kebohongan dilakukan atas nama demokrasi. Partai politik juga dikebiri. Strategi fusi partai yang dipaksakan hanya menguntungkan partai pemerintah yaitu

Golkar. Pemilu bagi masyarakat akhirnya memiliki makna mobilisasi dukungan demi kepentingan pemerintah dalam mempertahankan kekuasaan (Gaffar, 2000: 249-76)

Tentunya, mengingat pemilihan umum yang akan dilangsungkan tahun 2004, partai politik (khususnya yang baru) sudah harus mulai melakukan sosialisasi tahap awal yang berkaitan dengan ideologi partai, *platform* partai baik dalam lingkup nasional atau skala lokal. Misalnya di tingkat masyarakat bawah yaitu nagari. Tanpa itu, dukungan maksimal dari masyarakat pemilih sangat sulit untuk diraih.

Pemilu 2004 mendarang dianggap strategis bagi perjalanan bangsa ini setelah 5 tahun belum mampu keluar dari jeratan krisis multi dimensi. Melalui pemilu akan didapatkan satu pola kepemimpinan nasional yang kuat, merakyat dan mampu mengeluarkan bangsa dari situasi krisis. Oleh karenanya setiap partai berupaya maksimal mencari dukungan agar mereka dapat menyelenggarakan kekuasaan yang *legitimate* setelah pemilu dilaksanakan. Meskipun pemilu 1999 telah dilaksanakan secara demokratis, artinya telah mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun demikian, beberapa penyimpangan dan "ketidaksihonestan sistem pemilu" tersebut dianggap belum mencerminkan harapan dari masyarakat khususnya menyangkut keterwakilan masyarakat. Sesungguhnya, yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemilu tersebut adalah pada penggunaan sistem yang sesuai bagi kondisi realitas politik masyarakatnya. Walau disadari bahwa tidak ada sistem pemilu yang ideal di dunia ini, namun upaya meningkatkan keterwakilan masyarakat haruslah menjadi prioritas utama. Ini sangat beralasan mengingat partai politik menjadi "duta politik" masyarakat dalam pertarungan politik di parlemen.

IV. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Mendeskripsikan secara komprehensif fenomena kehidupan politik masyarakat di tingkat nagari yang terkait variabel-variabel yang mempengaruhi pembentukan dukungan politik bagi sebuah partai dalam sebuah pemilihan umum.
2. Memberikan masukan (*input*) yang berkaitan dengan strategi politik (*political crafting*) yang akan dibertakukan oleh partai politik dalam mengumpulkan dukungan suara dari masyarakat pemilih di tingkat nagari

V. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 1) Terhadap perkembangan teori perilaku politik (*political behavior theory*), khususnya yang berkaitan dengan proses pemberian dukungan terhadap partai politik di tingkat kehidupan masyarakat di nagari. 2) Diharapkan juga hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi politik (*political reference*) bagi partai politik dalam menyusun strategi politik guna memaksimalkan perolehan suara (dukungan politik) pada gradasi masyarakat lokal dalam setiap pemilu.

VI. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan titik tekan pada kajian tradisionalisme atau fenomenologi (Maleong, 1991). Penelitian ini sangat *concern* terhadap pemahaman individu sebagai aktor politik. Data yang diperoleh dianalisa dan diinterpretasikan sesuai dengan fenomena yang menjadi dasar penulisan penelitian ini. Semua data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelum wawancara dilakukan. Selain itu, penelitian ini menggunakan data agregat dan data dokumenter sesuai dengan data yang ingin dicari. Data agregat adalah data yang telah diolah oleh orang lain, terutama penelitiannya, misalnya, hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel, jurnal-jurnal ilmiah dan lain sebagainya.

Responden yang diwawancarai dipilih dengan menggunakan teknik non probabilitas sampling yaitu *purposive sampling*. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah mereka yang menjadi pengurus partai politik yang ada di Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah (DPD) khususnya bidang Pemenangan Pemilu. Adapun yang menjadi responden adalah 5 (lima) partai besar pemenang pemilu di Sumatera Barat tahun 1999 yang lalu yaitu P.Golkar, PAN, PPP, PDI-P, dan PBB.

VII. JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan Penelitian	X					
2	Pengumpulan data		X	X	X		
3	Pengolahan data			X	X		
4	Analisis data				X	X	
5	Penulisan Laporan Awal					X	
6	Seminar Hasil					X	
7	Penulisan Laporan Akhir						X

VIII. PERSONALIA PENELITIAN

No	Nama/NIP	Gol.	Jabatan	Jurusan
1	Asrinaldi, SIP, M.Si NIP. 132 282 153	III A	Ketua	IPolitik
2	Janaka Adisran No.BP. 98193002	Mhs	Anggota	IPolitik
3	Drs.Bakaruddin R.MS NIP. 131 474 823	IV A	Pembimbing	IPolitik

IX. HASIL PENELITIAN

1. Implikasi Politik Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Secara Langsung

Sesuai dengan kondisi Bangsa Indonesia yang transisional, maka UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilu dan UU lain yang juga merupakan paket pelengkap dari UU ini, dianggap masih belum memadai untuk dijadikan acuan tetap. Untuk itu pada pemilu 2004 mendatang pelaksanaan pemilu tersebut secara yuridis harus mengacu pada UU pemilu yang telah direvisi. Meskipun demikian, dalam pemilu mendatang kecenderungan penggunaan Sistem Proporsional ini masih menjadi "pilihan terbaik". Karena memang dalam kenyataannya sistem ini mengakomodasi suara partai kecil dalam pemilu (Gaffar, 1999: 249-76) Hal ini bersesuaian dengan keinginan sebagian aktifis partai yang ada di parlemen bahwa *Proportional Representation* dianggap masih relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Fenomena menjamurnya partai politik pasca Orde Baru tumbang, akhirnya menggeser bandul format sistem kepartaian. Ini dapat dijeaskan dengan menggunakan teori Giovanni Sartori (1976) yakni dari *hegemonic party system* ke *moderate pluralized party system*.

Periode transisi menuju demokrasi yang sedang dilalui Bangsa Indonesia saat ini, juga berdampak pada perubahan-perubahan progresif terhadap seleksi kepemimpinan nasional. Selama ini hanya partai politik yang dominan dalam menentukan kepala pemerintahan/kepala negara. Keinginan melibatkan rakyat dalam memnetukan format kepemimpinan nasional ini lambat laun mengkristal dan muncul kepermukaan untuk segera diakomodasi. Dan pada akhirnya keinginan tersebut menjadi agenda besar dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2001.

Dalam amandemen UUD 1945, perubahan ke 3 yang disahkan tanggal 10 November 2001, pada Pasal 6A ayat 1 telah dinyatakan secara tegas bahwa "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*". Perubahan mekanisme paket pemilihan presiden dan wakil presiden ini juga turut merubah peta kekuatan politik dalam sistem politik di Indonesia. Pemilihan pasangan pemimpin nasional secara langsung ini jelas membawa dampak yang signifikan pada rakyat. Rakyat selama ini hanya tahu memilih partai politik, tanpa harus mengenal secara dekat siapa wakil mereka yang duduk di parlemen. Artinya, sebagai konsekuensi dari penerapan Sistem Proporsional stelsel daftar, maka yang menentukan susunan wakil rakyat yang akan duduk di parlemen dan berasal dari partai politik pemenang pemilu sangat bergantung pada DPD Partai yang bersangkutan. Namun ini tidak akan terjadi lagi dalam pemilu 2004 mendatang.

Oleh karena ditetapkannya paket pemilihan kepemimpinan nasional secara langsung pada pemilu 2004 mendatang, tentunya ini sangat berpengaruh pada *political response* rakyat nantinya. Pengaruh variabel pemilihan langsung Presiden/Wakil Presiden ini dapat dijelaskan sebagai berikut, *pertama*, terhadap internal individu. Sebagai konsekuensi logis positif pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung adalah terjadinya proses pembelajaran politik secara alamiah bagi rakyat pemilih. Mereka secara sadar melakukan internalisasi nilai-nilai politik. Penilaian terhadap kandidat dan isu-isu yang dimunculkan (program) akan bermanfaat bagi mereka untuk menilai siapa yang sesuai dengan harapan dan dapat mengaspirasikan kepentingannya. Dengan demikian, rakyat akan mendasari pilihannya pada sesuatu pilihan yang rasional. Di negara-negara yang sudah mapan berdemokrasi, pilihan rasional selalu mendasari pilihan pada siapa kandidat yang dimunculkan dan isu-isu yang dikemasnya dalam pemilu tersebut (Niemi and Weisberg, 1984).

Secara teoritis, sebagaimana yang dikemukakan Greenstein (1975) bahwa sistem pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung adalah sebuah lingkungan (*environment*) yang akan mempengaruhi kecenderungan individu (*predisposition*) dalam memberikan respon politiknya (*political response*). Lingkungan yang syarat dengan nilai (*value laden*) akan diabsorpsi oleh individu membentuk kesadaran baru sebagai preferensi memilih atau tidak memilih, memilih di antara beberapa kandidat yang dicalonkan menjadi Presiden/Wakil Presiden. Kedua, terjadi perubahan kondisi sejarah (*historical condition*) dalam diri individu. Sistem pemilihan umum yang selama ini dikenalkan kepada masyarakat yaitu *proportional representation*. Kecenderungan sistem pemilu ini hanya memilih partai tanpa harus tahu siapa wakil-wakil partai tersebut duduk di parlemen. Model seperti ini tidak memberikan sesuatu yang berarti bagi rakyat pemilih. Dalam hal ini pertimbangan rasional yang mendasari mereka untuk memilih seseorang sebagai wakil rakyat.

Dengan sistem pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung secara bertahap merubah pola perilaku politik rakyat, khususnya dalam format pemilihan umum. Perubahan kondisi sejarah individu ini bersumber pada gerak objektifitas dalam realitas politik. Kebebasan dalam menentukan dan proses memilih adalah keniscayaan dalam diri manusia yang pada dasarnya merindukan kebebasan. (Suseno, 1999:58-59). Selama ini, proses pemilihan Presiden/Wakil Presiden di MPR secara hakikat telah menafikan makna kebebasan yang dimiliki oleh warga negara. Padahal secara politis merekalah yang selayaknya menjustifikasikan pemimpin mereka bukan partai apalagi perseorangan di dalam partai politik atau hanya segelintir fungsionaris Pengurus Pusat suatu Partai Politik.

Lalu bagaimana pula implikasi pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung terhadap sesama individu? Berikut ini dapat dijelaskan secara lebih rinci, pertama, akibat langsung dari absorpsi nilai-nilai yang diyakini tiap-tiap individu akan melahirkan perbenturan sikap dan pandangan. Konkritisasi dari absorpsi nilai-nilai tadi berakhir pada pembentukan seperangkat ide (*set of mind*) yang lebih dikenal dengan ideologi. Bagi rakyat pemilih, meyakini suatu ideologi disebabkan oleh harapan (*expectation*) yang dikandung oleh ideologi tersebut. Rakyat kebanyakan menyadari bahwa dengan mendukung ideologi tersebut akan berdampak pada pemenuhan harapan yang mereka miliki. Harapan-harapan tersebut berisikan kepentingan-kepentingan riil dalam hidup mereka.

Dengan banyaknya nilai-nilai di dalam realitas politik yang bermuara pada pemenuhan-pemenuhan kepentingan individu atau kelompok yang mendukung ideologi tersebut, pada akhirnya akan saling berbenturan (*clash*). Benturan inilah yang pada akhirnya melahirkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Bagi masyarakat politik yang tingkat budaya politiknya masih parokial dan subjektif¹, konflik kepentingan ini tak jarang berakhir dengan kekerasan (*political violence*). Di Indonesia, khususnya mengamati jalannya Pemilu 1999, benturan kepentingan yang bermuara pada kekerasan dalam masyarakat frekuensinya sangat tinggi.²

Kedua, konflik kepentingan antar individu tersebut adalah implikasi dari meningkatnya pemahaman rakyat terhadap realitas politik. Perubahan kondisi sejarah

¹ Secara teoritis, Almond dan Verba (1963) mengelompokkan budaya politik masyarakat ke dalam (1) budaya politik parokial, (2) budaya politik subjektif, (3) budaya politik partisipan. Karakteristik tiap-tiap budaya politik ini dapat dilihat dalam karya *The Civic Culture*. Lihat Juga Afen Gaffar (1999) *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

² Fenomena kekerasan politik dalam pemilu ini dapat dimati dalam mekanisme penyelenggaraan pemilu, misalnya pada waktu kampanye partai dan teror terhadap kelompok tertentu yang berseberangan ideologi atau berlainan partai.

individu yang mempengaruhi nilai-nilai tadi berdampak pada peningkatan kesadaran politik individu. Ini sesuatu yang positif. Akan tetapi, fenomena di Indonesia peningkatan pemahaman rakyat terhadap realitas politik tersebut yang belumlah diimbangi dengan peningkatan penghargaan terhadap perbedaan nilai-nilai yang diyakini individu atau kelompok lain. Dalam hal ini, minimalisasi terhadap konflik kepentingan dan saling menghormati kebebasan seseorang untuk meyakini nilai-nilai politiknya harus tercermin dalam setiap program partai yang ditujukan pada konstituennya. Selain itu juga dilakukan maksimalisasi peran dan fungsi partai politik kepada pendukungnya masing-masing. Proses pendidikan politik (*civic education*) juga harus mendapat perhatian bagi partai politik untuk mempertegas nilai-nilai demokratis dalam masyarakat.

2. Arti Strategis Nagari sebagai Basis Politik Riil Bagi Partai Politik

Dengan kondisi seperti ini, maka pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004 akan menjadi ajang pertarungan partai politik di tingkat nagari. Sudah pasti setiap partai politik akan berusaha memaksimalkan perolehan dukungan (*partisanship*) khususnya dari anak nagari. Ini cukup beralasan, otonomi politik di nagari membawa konsekuensi politik bahwa basis terakhir dari dukungan masyarakat pemilih di Sumatera Barat adalah Nagari. Nantinya, satu Nagari atau beberapa Nagari akan menjadi daerah-daerah pemilihan yang signifikan dalam perolehan suara partai. Realitas ini akan memposisikan nagari sebagai *political domain* yang diperebutkan partai. Dukungan dari anak nagari yang notabene masyarakat pemilih (*voter*) tentunya berdampak pada hasil suatu pemilihan umum di gradasi lokal. Gejala ini pada akhirnya menentukan bagaimana komposisi dan format kepemimpinan baik di tingkat kabupaten, provinsi dan bahkan nasional.

Sesungguhnya eksistensi partai politik sangat berhubungan dengan dukungan yang diberikan oleh masyarakat pemilih (*voter*). Tanpa dukungan yang maksimal dari masyarakat pemilih, suatu partai politik akan berkubur dengan sejarahnya. Oleh karenanya, perubahan *electoral law* dan *electoral process* yang telah dilakukan oleh pemerintah akan memberi implikasi politik yang signifikan bagi partai politik dan masyarakat pemilih (*voter*). Dan yang terpenting adalah bagaimana strategi politik (*political crafting*) dibuat oleh partai politik dalam mencari dukungan di tingkat lokal semisal Nagari. Program kembali bernagari yang dicanangkan oleh pemerintahan daerah melalui Perda No.9 tahun 2000, turut memposisikan anak nagari menjadi pelaku politik yang rasional, mandiri, dan menjadi aktor atas preferensi politiknya. Ini terlihat dengan partisipasi aktif mereka, adanya persamaan suara, distribusi informasi politik yang melahirkan pemahaman yang sama dalam proses politik, dan adanya kontrol atas agenda pemerintahan nagari menjadi kompatibel dengan implementasi nilai demokrasi moderat. Tentunya melalui sistem distrik serta penerapan mekanisme pemilihan langsung, akan memperkuat posisi nagari menjadi basis dukungan yang riil dan potensial bagi Partai Politik

Nagari dengan entitas politiknya menjadi pendukung riil bagi suatu partai politik dalam pemilihan umum. Kekuatan massa pendukung di akar rumput (*grass roots*) ada di Nagari. Mengapa? Ini dapat dijelaskan, pertama, Di Sumatera Barat, nagari adalah cerminan kehidupan masyarakat yang hidup dilingkup adat dan tradisi. Secara sosiologis masyarakat di Nagari sangat terikat dengan sistem adat dan tradisi. Dan dalam sistem adat tradisi terdapat penghulu adat. Yang menarik tiap-tiap Nagari jelas memiliki sistem adat dan tradisi khas Nagari yang bersangkutan. Artinya, persekitaran nilai-nilai adat yang berlaku hanya di lingkup Nagari yang bersangkutan, *adat salangka nagari*. Dalam konteks yang lebih luas penghulu adat adalah cerminan seorang pemimpin di Nagari.

Dengan demikian, penghulu adat menjadi strategis mengingat tugasnya yang sangat luas hampir berkenaan dengan kehidupan orang banyak, menurut Idrus Hakimy DT. Rajo Penghulu (2001:7-29) di antaranya (1) *Manuruik aluah nan luruih* : a)melaksanakan *kato pusako* b)melaksanakan kata mufakat c)*kato dahulu batapati* d)*kato kamudian kato bacari* (2) *Manampuah jalan nan pasa*, artinya tugas menjalankan/mencari kebenaran (3) *Mamalihar harto pusako*. Ini menyangkut tugas penghulu memilihara dan menanamharta pusaka anak kemenakannya. Sebab harta pusaka secara simbolik adalah daerah teritorial kekuasaan seorang penghulu (4) *Mamalihar anak kamanakan*. Tugas ini merupakan yang paling berat dan suci mengingat penghulu berkewajiban membimbing anak-kemenakannya..

Nagari memiliki basis massa yang riil kehidupan politik. Dimana dengan otonomi seluas-luasnya, kehidupan adat-tradisi menjadi "hidup kembali".³ Dengan demikian penghulu adat akan menempati posisi yang strategis dalam upaya menggalang dukungan massa, sebab fenomena ini terkait dengan tugas dan fungsinya di nagari. Kecenderungan lain yang memosisikan Nagari menjadi *locus* politik yang signifikan adalah pola patronase politik di tingkat Nagari. Dan tentu partai politik yang ada sangat menyadari dengan membentuk kepengurusan hingga di tingkat nagari seperti PPP, P.Golkar, dan PAN.

Kedua, Nagari menjadi bagian terkecil dari sistem penyelenggaraan otonomi pemerintahan di Sumatera barat. Ini berarti implemnatasi program dan pelaksanaan fungsi pemerintahan berakhir di Nagari. Dan partai politik sanagt menyadari ini. Dimana jalur birokrasi pemerintahan terkecil mampu menjadi "mitra politik" dalam pemilihan umum mendatang. Meskipun netralitas birokrasi (baca:Pegawai Negeri Sipil) dalam pemilu suatu keharusan dan diatur tegas melalui PP No.5/1999, akan tetapi pemerintahan di Nagari bukanlah birokrasi pemerintahan (PNS). Lembaga eksekutifnya yaitu Wali Nagari serta Legislatifnya ketua Badan Perwakilan Anak Nagari dipilih secara demokratis oleh masyarakat.⁴

Ketiga, bagi partai politik aktualisasi program kerja mereka justru lebih strategis di Nagari ketimbang masyarakat di kota yang semakin sadar dengan keberadaan partai politik yang jauh dari apa yang diharapkan. Masyarakat Nagari yang masih "tradisional" dalam bersikap dan bertindak⁵ bagi partai politik menjadi "target" baru untuk mendiseminasikan ideologi dan program partai. *Keempat*, sebagai sebuah model "pemerintahan baru" dalam arti penyelenggaraan kekuasaan tradisioanal dengan mengadopsi kekuasaan modern yang legal formal (birokrasi), kehidupan di Nagari terbiasa dengan praktek-praktek berdemokrasi. Keputusan yang dibuat di dalam masyarakat selalu berlandaskan asas musyawarah dan mufakat. Ini berarti demokrasi prosedural yang biasa dikembangkan oleh teoritisi barat sudah mengakar lama dalam adat dan tradisi masyarakat di Nagari. Oleh karenanya, pemilu sebagai wahana

³ Konsep pemerintahan desa yang dikembangkan oleh pemerintah pusat melalui UU No.5/1979 jelas menjauhkan masyarakat di Nagari dari sistem adat -tradisinya. Kebijakan penyeragaman pemerintahan terkecil dalam bentuk pemerintahan desa adalah sebuah upaya politis untuk mengontrol aktifitas politik masyarakat. Dan kebijakan ini merupakan bagian dari format *floating mass* pemerintah pusat.

⁴ Untuk membantu terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan umum dengan baik, pemerintah kabupaten menmpatkan 1-3 orang pegawainya (PNS) di Nagari yang ada. Akan tetapi jalannya pemerintahan nagari tersebut tetap sanagt bergantung pada kerjasama Wali Nagari dan BPAN-nya

⁵ Asumsi ini didasarkan pada teoritisasi budaya politik yang berkembang di masyarakat yaitu subjektif sebagaimana yang dikemukakan Almon And Verba (1963). Budaya politik juga berkaitan dengan tingkat literasi/pendidikan, pengalaman berpolitik, tingkat kesejahteraan, penguasaan informasi dan sebagainya.

demokratis dalam proses pembentukan pemerintahan dalam skala nasional sudah di praktikkan jauh sebelum Indonesia sebagai *nation state* lahir.

3. Faktor-faktor Yang Menentukan Kemenangan Suatu Partai Politik Pada Pemilu 1999

Tantangan pemilu ke depan adalah bagaimana memaksimalkan dukungan suara di pad pemilu ke depan. Mengingat pada pemilu 2004 mendatang ada ratusan partai politik yang telah berdiri dan berkeinginan ikut pemilu. Meskipun ada persyaratan yang tegas dari pemerintah (*electoral law*) tentang syarat partai politik yang mengikuti pemilu, namun dapat dibayangkan dengan 48 partai politik yang ikut pemilu 1999 bagaimana masyarakat menjadi "kebingungan" dalam mengidentifikasi satu partai dengan yang lain.

Di Sumatera Barat ada 42 partai politik yang ikut pemilu. Artinya 42 partai inilah yang mempunyai kepengurusan di beberapa daerah kab/kota yang ada hingga ke tingkat ranting. Meskipun dalam kenyataannya, masyarakat masih ada memberikan suara pada partai yang secara de facto tidak memiliki kepengurusan di Sumatera Barat. Dapat dibayangkan, kebingungan yang lain kalau seandainya partai politik yang ikut pemilu sampai ratusan. Dari pertarungan dalam perolehan suara pada pemilu 1999 yang lalu hanya 6 partai yang memperoleh suara besar di parlemen Sumatera Barat.

Tabel 1

No	Partai Politik	Perolehan Suara		
		DPR	DPD I	DPD II
1	Partai GOLKAR	459.577	464.729	459.332
2	Partai Amanat Nasional	430.848	423.315	422.021
3	Partai Persatuan Pembangunan	400.702	402.359	401.954
4	PDI-Perjuangan	212.338	213.749	210.365
5	Partai Bulan Bintang	115.693	115.928	113.175
6	Partai Keadilan	56.018	58.375	57.580

Sumber: Pemilihan Umum Tahun 1999 Dalam Angka, Direktorat Sosial Politik Sumbar.

Jika dipahami secara mendalam bahwa pemilu 1999 adalah pemilu yang diselenggarakan dalam periode transisional. Periode transisional ini ditandai dengan upaya mencari legitimasi kuat terhadap kepemimpinan nasional. Legitimasi baru harus dibangun ketika kepemimpinan nasional yang lama sudah mengalami krisis. Mekanisme yang tepat adalah melalui pemilu. Oleh karena keterwakilan masyarakat di parlemen, aspirasi dan kebebasan berserikat-berkumpul yang dibelenggu selama ini, muncul keinginan untuk memformat ulang sistem kepartaian dalam sistem politik yang pada akhirnya melahirkan banyak partai politik. Dari sekian banyaknya partai yang baru, partai politik tersebut suka - tidak suka, siap - tidak siap harus bertarung mengumpulkan suara rakyat dalam pemilu dengan partai politik lain yang telah lama berdiri dan mengakar dalam masyarakat, seperti PPP, Golkar dan PDI. Namun demikian, ada beberapa di antara partai politik yang baru tersebut mampu bersaing dan memperoleh dukungan yang maksimal.

Tentunya muncul pertanyaannya, mengapa hanya 6 partai politik yang memperoleh suara yang signifikan pada pemilu 1999 yang lalu? Dan di antaranya adalah beberapa partai yang baru, variabel apa yang mempengaruhi perolehan suara tersebut?

Pertama, ternyata partai politik yang memperoleh suara yang signifikan tersebut memiliki kondisi historis (*history condition*) afiliasi kepartaian yang panjang misalnya dari orang tua, lingkungan sosial keluarga, dan lingkungan kerja. Afiliasi partai ini

terbangun dari proses sosialisasi politik yang dilakukan partai politik melalui beberapa media seperti keluarga, sekolah, atau tempat kerja. Hal ini terbukti jelas ketika beberapa partai politik berhasil memperoleh suara signifikan dalam pemilu 1999 yang lalu seperti PAN, P. Golkar, PPP, dan PBB.

Tabel 2

No	Partai Politik	Yang Memfasilitasi	Media
1	P. Golkar	1)keluarga, 2) lingkungan kerja	Birokrasi
2	PAN	1)keluarga	Muhamaddiyah
3	PBB	1)keluarga	Masyumi
4	PPP	1)keluarga, 2)lingkungan sosial	Masyumi/Muhammadiyah/Pesantren/Majelis taklim

Sumber: data olahan

Bagi partai politik yang ideologi perjuangannya mirip seperti PAN, PPP, dan PBB terjadi polarisasi massa pemilih dalam menentukan partai yang sesuai dengan aspirasinya. Ini memang sangat sulit bagi partai politik. Sementara bagi pemilih (*voter*) pilihan untuk menentukan partai politik mana yang sesuai dengan keinginannya menjadi dilema tersendiri.

Kedua, ideologi perjuangan partai. Ada kemiripan di antara partai politik yang melandasi *platform*nya dalam pemilu 1999. Bagi kalangan ilmuwan politik, pengelompokan partai ke dalam beberapa ideologi ini akan memudahkan analisa terhadap partai yang bersangkutan. Hal ini pernah dilakukan oleh Herbert Feith dan Lance Castles (1970).⁶ Dalam hal ini Feith memetakan partai politik yang ada pada waktu itu ke dalam beberapa ide besar pemikiran politik yang merefleksikan ideologi yang dikandungnya yaitu Nasionalis Radikal yang direpresentasikan oleh PNI, Islam yang direpresentasikan oleh NU dan Masjumi, Komunisme oleh PKI, Sosialis Demokrat oleh PSI dan Tradisionalisme Jawa oleh beberapa individu-individu yang berperan dalam pemerintahan.⁷

Pada pemilu 1999 dengan kehadiran banyak partai, maka 'kelatahan' untuk memetakan ideologi partai tersebut juga terjadi sebagaimana yang dilakukan Feith dan Castles (1970) menghinggapi ilmuwan politik Indonesia, terlepas dari yang melatar belakangi pemetaan tersebut, yang jelas pemetaan ini menjadi relevan dan penting untuk menganalisa partai politik yang bertarung pada pemilu 1999 tersebut. Dan juga pemetaan ini sangat berguna untuk mengetahui basis massa sebagai pendukung dari partai tersebut.

⁶ Lihat Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* yang diterjemahkan oleh LP3ES tahun 1988.

⁷ *Ibid*, bagian Pengantar xvii.

Tabel 3

No	Partai Politik	Garis Ideologi	Basis Massa Riil
1	P. Golkar	Nasionalis Sekuler	Klp pro status quo, massa pedesaan/perkotaan, klp menengah atas
2	PAN	Nasionalis Religius	Menengah perkotaan, klp terpelajar
3	PPP	Islam	Klp muslim tradisional, klp menengah perkotaan
4	PBB	Islam	Klp muslim tradisional/modern, klp Islam fanatik, klp menengah perkotaan
5	PDI-Perjuangan	Nasionalis Sekuler	Massa perkotaan kelas bawah, klp masy bawah pedesaan, klp menengah bawah
6	Parta Keadilan	Islam	Intelektual kampus dan muslim terpelajar, klp pengajian

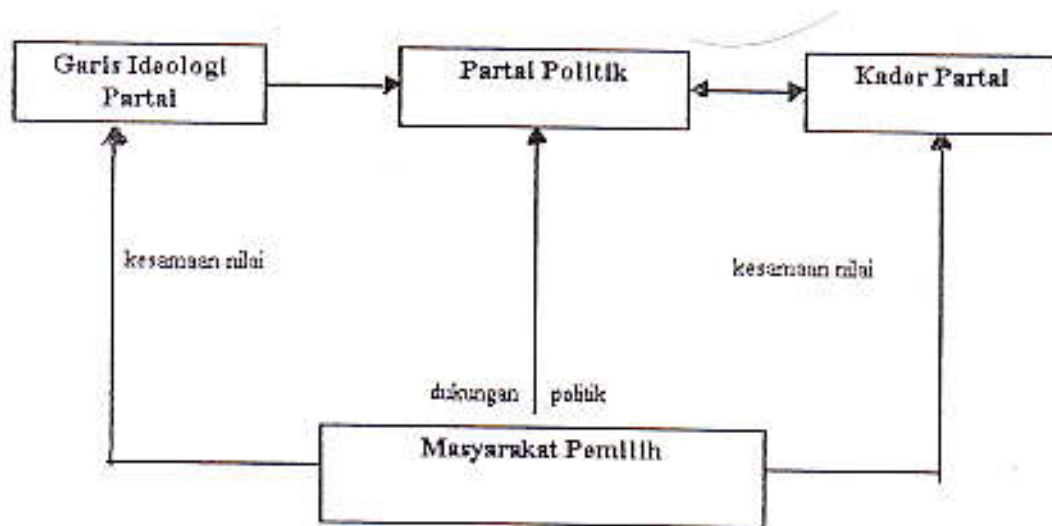
Sumber: Data Olahan

Pengelompokan basis massa tersebut bukanlah sesuatu yang tegas. Sebab dalam realitas politik massa pemilih (*voter*) saling tumpang tindih. Artinya, bagi partai politik masih dimungkinkan untuk 'merayu' pemilih untuk memilih partainya asal masih satu garis ideologi. Dengan demikian, maksimalisasi dukungan tergantung pada strategi yang digunakan partai yang bersangkutan.

Ketiga, orientasi masyarakat terhadap individu di dalam partai politik. Dalam realitas politik di Indonesia peran seorang figur pemersatu atau "sosok pengayom" bagi kehidupan masyarakat masih menjadi dambaan. Pola paternalisme politik masih kuat mengakar di dalam masyarakat. Begitu juga dengan paternalisme dalam partai politik. Barangkali tidak dapat dipungkiri bahwa orientasi ini masih dominan dalam kehidupan politik di Indonesia. Diperkirakan pemilu 2004 mendatang "sosok pengayom" ini masih menjadi faktor penentu dalam upaya partai memaksimalkan dukungan *voter*. Namun demikian, orientasi terhadap figur ini bukanlah sesuatu yang rasional sebagaimana yang dikembangkan oleh aliran psikologis (mashab michigan)⁸ Orientasi terhadap figur pada kasus masyarakat Indonesia semata-mata bukanlah karena berdasarkan pertimbangan isu program yang ditawarkan kandidat melainkan pada ikatan-ikatan sosiologis semata misalnya, kesamaan nilai-nilai yang diyakini, rasa keterpinggiran bersama dan sebagainya.

⁸ Aliran psikologis ini mengembangkan suatu analisa terhadap perilaku memilih seseorang ke dalam beberapa variabel yang sangat menentukan 1)identifikasi kepartaian 2)orientasi terhadap kandidat 3) orientasi terhadap isu. Dan ketiga konsep ini jelas saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya lihat Richard G. Niemi and Herbert F. Weisberg, 1984. *Controversies In Voting Behavior*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.

Berikut ini hubungan figur dan partai tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



gambar 1: hubungan antara kesamaan ideologi partai dengan masyarakat

Tabel 3

No	Partai Politik	Yang Menjadi Figur
1	Partai GOLKAR	B.J. Habibie dan Akbar Tanjung
2	Partai Amanat Nasional	H. M. Amien Rais
3	Partai Persatuan Pembangunan	Hamzah Haz
4	Partai Bulan Bintang	Yusril Ilza Mahendra
5	Partai Kebangkitan Bangsa	K.H. Abdurrahman Wahid dan Matori Abdul Jalil

sumber: data olahan

Keempat, berlakunya praktek politik uang (*money politics*). Perilaku seperti ini sangat sulit untuk diidentifikasi secara tegas. Akan tetapi perilaku ini terindikasi sewaktu partai politik melakukan kampanye politik. Pengumpulan massa oleh partai politik dengan cara memberi imbalan dalam bentuk uang atau barang sangat jamak terjadi. Tentunya, perilaku ini tidak berakhir sebatas kampanye partai akan tetapi juga hingga ke perilaku *voting* di bilik suara.⁹

⁹ Dalam terminologi aliran psikologis (mastab michigan), variabel yang mempengaruhi pilihan seseorang hingga *voting* dan sesuai dengan keinginan partai politik disebut variabel *short term forces*.

Strategi Dalam Pengumpulan Suara Partai Politik Pada Pemilu 1999.

Belajar pada pengalaman pemilu 1999 yang dapat dijadikan acuan untuk membuat kerangka analisa guna memaksimalkan suara partai politik pada pemilu 2004 mendatang. Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama pasca Orde Baru diikuti oleh banyak partai. Banyaknya partai politik tersebut tak jarang menyebabkan terjadinya tumpang tindih strategi.

Pertama, banyaknya partai politik yang tampil sebagai peserta pemilu tahun 1999 membawa pengaruh pada masyarakat di lapisan bawah yang "kebingungan" mengidentifikasi partai politik yang ada. Dari fakta politik yang ada terlihat bahwa setiap partai politik belum melakukan strategi pemetaan (*mapping*) terhadap konstituen mana yang akan mereka rangkul menjadi pendukung pada pemilu 1999 tersebut. Pemetaan tersebut sangat relevan dengan isu program apa yang harus mereka tawarkan. Akibatnya terjadi tumpang tindih dukungan dimana setiap partai politik selalu menjual isu program yang sama dalam kampanye. Dan tidak ada "ke-khas-an" program partai tertentu yang dapat dibedakan oleh rakyat pemilih (*voters*).

Kedua, strategi yang lain yang juga hampir sama dalam pengumpulan suara pada pemilu 1999 adalah upaya mengagas isu program dalam kampanye yang "mengawang-awang". Artinya, isu program dalam setiap kampanye sangat abstrak, besar, dan tidak menjangkau kebutuhan riil masyarakat pemilih. Hal ini disebabkan karena waktu yang sangat singkat dalam persiapan pelaksanaan pemilu 1999, sehingga partai politik hanya sempat memikirkan bagaimana konsolidasi internal partai politik tersebut. Dan hampir setiap partai politik melakukan ini termasuk partai yang sudah mapan seperti PPP, P. Golkar ataupun PDI-P. Satu keuntungan partai-partai besar seperti P. Golkar yang sudah "mendapat tempat" di dalam masyarakat karena keberadaannya sebagai partai yang berkuasa dan sejarahnya yang panjang dalam kepolitikan nasional..

Ketiga, setiap partai politik hampir sama cara pandangnya dan dasar pikirnya ketika menyusun strategi dalam meraih dukungan pemilih, yaitu dengan cara menampilkan siapa tokoh yang dikagumi atau diidolakan oleh masyarakat di mana kampanye pemilu dilangsungkan. Partai politik semata-mata lebih menonjolkan aspek individu kadernya ketimbang tawaran rasional dari program yang dibuat oleh partai itu sendiri. Ini tentu beresiko terhadap proses pembelajaran politik masyarakat yang tidak mandiri, tidak rasional dan berorientasi pada nilai-nilai yang abstrak. Hampir keseluruhan partai menerapkan pola seperti ini pada pemilu 1999 yang lalu.

Keempat, strategi dalam rekrutmen keanggotaan partai politik pada pemilu 1999 menjadi asal-asalan dengan hanya memperhatikan aspek kuantitas kader ketimbangan aspek kualitas kader. Ini berdampak hebat pada komposisi keanggotaan parlemen yang terbentuk pasca pemilu 1999, dimana banyak kualifikasi seorang anggota legislatif tidak terpenuhi oleh kader partai dan tentunya ini berimbas pada kinerjanya dalam mewakili aspirasi masyarakat.

Kelima, di antara partai politik yang ikut pemilu 1999 hanya sebagian kecil saja partai yang rutin melakukan strategi pendidikan politik pada kader dan konstituen pemilihnya. Sementara banyak partai-partai politik tersebut mengabaikan aktifitas ini. Padahal aktifitas ini harus berkesinambungan jika partai tersebut ingin mendapat dukungan maksimal pada pemilu mendatang.

4. Strategi Partai Politik Dalam Mengumpulkan Suara Pada pemilu 2004

Nagari sebagai *locus* politik yang riil pada pemilu 2004 mendatang akan mempunyai arti yang sangat strategis bagi partai politik. Perebutan suara akan berlangsung ketat di *level* ini. Baik program, ideologi dan kandidat akan mempunyai arti tersendiri bagi masyarakat nagari. Persoalannya sekarang adalah bagaimana fungsionaris partai politik menyusun strateginya sehingga partainya mendapat dukungan penuh. Bagian ini akan mencoba menganalisa strategi partai politik ke depan sesuai dengan kondisi riil di nagari.

Mengamati perilaku masyarakat nagari (baca: anak nagari) di tataran *praxis*, terdapat perubahan yang cukup signifikan. Perubahan itu terlihat dari model partisipasi politik mereka yang semakin membaik. Paling tidak, ini diakui sendiri oleh fungsionaris partai politik.

*"masyarakat nagari sekarang sangat jauh berbeda dengan masyarakat desa dahulunya, maksud berbeda disini masyarakat nagari mempunyai tingkat kesadaran berpolitik yang cukup tinggi mereka sudah bisa membentuk perangkat pemerintahan nagari sendiri, membentuk organisasi yang mendukung kegiatan di nagari serta melaksanakan pembangunan nagari atas dasar inisiatif sendiri"*¹⁰

Tak dapat dipungkiri pesatnya perkembangan teknologi informasi berdampak pada struktur dan pola perubahan sosial masyarakat hingga ke tingkat bawah. Absorpsi informasi memberi pemahaman baru bagi mereka tentang makna politik di tataran *praxis*. Namun demikian, absorpsi informasi ini ternyata tidak dibekali dengan pengetahuan mendasar tentang kehidupan politik. Misalnya, tentang makna dan hakikat partai politik yang dipahami.

*"pada dasarnya masyarakat sangat antusias dan sadar untuk ikut berpolitik dan menyalurkan aspirasinya salah satunya melalui partai politik. Namun kendala masih muncul karena masih sedikit pengetahuan mereka tentang partai politik serta seluk beluk dari partai tersebut. Walaupun ada juga sebagian masyarakat yang mengerti dan terlibat dalam keanggotaan suatu partai politik, tapi tidak sebanding dengan masyarakat yang hanya pasif dan buta terhadap partai."*¹¹

Di sisi lain, kembali ke bernagari membuat kehidupan politik masyarakat semakin mengakar dan menjadi rutinitas. Aktifitas adat dalam bernagari lambat laun menjadi rutinitas politik. Sesungguhnya ini menjadi menarik. *Pertama*, kekuasaan adat dan tradisi yang merupakan kekuasaan tradisional berubah menjadi modern ketika dilembagakan ke dalam struktur negara. Akibatnya kekuasaan tersebut mengarah pada kekuasaan legal formal.¹² *Kedua*, persoalan-persoalan kultur masyarakat nagari yang berurat berakar dengan mudah terkooptasi oleh persoalan-persoalan struktural yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral kemasyarakatan.

¹⁰ Wawancara dengan salah seorang fungsionaris PPP Cab. Kab. Solok (Bpk.Nuzirwan)

¹¹ Wawancara dengan Wali Nagari Gantung Ciri Kab. Solok

¹² Tipologi kekuasaan dalam masyarat diurai secara gamblang oleh Weber menjadi 1)kekuasaan tradisional 2)kekuasaan legal formal 3)kekuasaan kharismatis. Selanjutnya lihat April Carter, 1979. *Authority And Democracy*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Sebagai sebuah target bagi partai politik, memaksimalkan dukungan suara dari nagari bukanlah pekerjaan mudah, mengingat perubahan-perubahan masyarakat yang mulai berubah dalam konteks sadar politik (*political consciousness*). Keunggulan suatu partai sangat bergantung pada kemampuan partai politik tersebut menyusun strategi dan mengimplementasikannya.

Pada pelaksanaan pemilu 1999 yang lalu, hampir semua partai politik menggunakan strategi yang sama. Cara-cara dan isu-isu kampanye mereka selalu tumpang tindih sehingga tidak ada perbedaan yang jelas antara satu partai dengan partai yang lain. Padahal dalam *rational choice theory* perbedaan inilah yang akan membuat memosisikan suatu partai unggul dari partai yang lain. Sebagaimana dijelaskan pada bagian ke tiga dari bahasan ini, terdapat persinggungan strategi antara satu partai politik dengan partai yang lain. Idealnya pilihan terhadap strategi harus mengacu pada siapa yang menjadi target dalam maksimalisasi dukungan suara tersebut. Karena tidak semua strategi dapat diterapkan pada semua keadaan.

Pertama, setiap partai harus dapat memetakan (*mapping*) dukungan politiknya dalam masyarakat. Pemetaan ini akan menjadi bermakna sebab strategi akan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi politik riil. Partai harus menyadari bahwa dalam masyarakat di lapisan bawah semisal nagari, dukungan dari konstituen terkelompok pada:

1) konstituen tetap. Artinya, secara sosiologis seperti ikatan nilai-nilai ideologis maupun secara psikologis seperti identifikasi kepartaian yang terbangun terdapat kesetiaan yang tertanam dalam diri *voters*. Tapi walaupun demikian tidak ada jaminan bahwa *the loyal voters* akan konsisten pada dukungannya. Oleh karenanya, partai harus bisa menjalin komunikasi terus dengan pemilih tetap. Hal yang patut dilakukan partai adalah dengan merealisasikan isu program partai di waktu kampanye pemilu yang lalu dengan segera. Partai politik akan segera ditinggalkan kalau realisasi apa yang pernah dijanjikan tidak ditepati.

2) konstituen berayun (*swing voters*). Pemilih yang kecewa dengan partai yang dipilihnya pada pemilu yang lalu akan meninggalkan partai politik tersebut. Kondisinya secara psikologis membuat *voter* tidak tetap untuk menentukan partai politik apa yang ideal bagi mereka selanjutnya. Di tengah keragu-raguan tersebut, strategi partai politik untuk merangkul mereka haruslah pas dan sesuai dengan harapan mereka. Merangkul mereka tidak saja dalam bentuk pemberian janji-janji pada waktu kampanye akan tetapi sudah pada tataran aksi sebelum satu atau dua tahun pemilu dilangsungkan. Partai politik dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat seperti pelatihan, pendidikan atau pengkaderan, memfasilitasi usaha masyarakat dan sebagainya. Pada pemilu 2004 mendatang *swing voters* ini sangat signifikan mengingat kegagalan banyak partai politik memenuhi janji-janji mereka saat pemilu yang lalu dan semakin meningkatnya kecerdasan politik masyarakat bawah.

3) konstituen pemula. Menjelang pemilu 2004 mendatang akan muncul pemilih-pemilih pemula yang akan menyalurkan suaranya untuk pertama kali. Keberadaan mereka (generasi muda) ini menjadi penting bagi setiap partai politik. Mereka kebanyakan berasal dari kalangan anak sekolah lanjutan tingkat atas. Tentunya, partai politik berupaya menyusun strategi pengenalan partai mereka kepada pemilih pemula ini. Beberapa strategi yang harus dilakukan di antaranya adalah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak sekolah dalam mengadakan kegiatan kurikuler atau ekstra kurikuler, memfasilitasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan generasi muda tersebut. Dan ikut aktif terlibat dalam diskusi-diskusi publik yang melibatkan pemilih pemula tersebut.

Kedua, setiap partai politik pasti memiliki ideologi sebagai panduan untuk mencapai cita-cita partai. Persoalannya adalah bagaimana partai politik dapat mengoperasionalkan ideologi tersebut ke dalam program-program kerja yang riil. Dan yang jelas program kerja tersebut harus memenuhi kebutuhan masyarakat (*need assessment*). Apraisal terhadap kebutuhan masyarakat di nagari harus dikaji secara mendalam jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu. Sebab ini akan berkaitan dengan kemas isu program kerja sewaktu kampanye pada pemilu mendatang. Bagi partai politik yang mampu memperhatikan kerja ini, dukungan akan diperolehnya secara maksimal. Kondisi riil nagari yang selama ini tertinggal dari aspek pembangunan akan menjadi isu yang signifikan dalam kampanye nanti. Dan semuanya terpulang pada partai politik isu apa yang akan mereka kemas yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, usaha kecil dan menengah, berpemerintahan yang baik tingkat nagari dan sebagainya.

Namun satu hal yang harus diperhatikan, bahwa dengan kecenderungan masyarakat nagari yang semakin cerdas, maka yang akan mempopulerkan isu program kerja yang dikampanyekan harus kader yang "melekat" dihati masyarakat nagari tersebut. Kita tak dapat pungkiri bahwa figur kader yang memiliki integritas tinggi di masyarakat masih menempati posisi strategis dalam menentukan dukungan suara walaupun kader partai politik tersebut tidak mampu mengemas isu-isu dalam kampanye.¹³

Ketiga, setiap partai politik harus dapat memilih media kampanye yang relevan dengan siapa yang menjadi target politiknya. Karena tidak semua media dapat digunakan sebagai media kampanye. Pemanfaatan teknologi komunikasi melalui media elektronika hanya pada kalangan masyarakat menengah atas saja yang hidup di perkotaan dan *periphery*. Namun tidak bagi masyarakat yang tinggal di *rural area*. Pilihan terhadap media cetak akan lebih tepat. Begitu juga dengan pilihan menggunakan kartu pos harus memperhatikan siapa yang akan menjadi konstituennya. Bagi masyarakat yang *illeteracy* pilihan ini menjadi tidak sesuai.

Keempat, sesuai dengan segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum partai politik dapat dibagi ke dalam partai dua jenis yaitu partai kader dan partai massa. (Haryanto, 1982: 96-97). Oleh karenanya, khusus bagi partai kader rekrutmen kader menjadi sangat penting. Perekrutan kader-kader partai sebaiknya dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan. Artinya, satu atau dua tahun menjelang pemilu dilaksanakan setiap periodenya dilakukan rekrutmen kader. Karena keterbatasan yang dimiliki partai politik merekrut kadernya, maka yang harus diupayakan adalah penularan "virus multilevel". Setiap kader harus dapat mengupayakan kesetiaan atau mempengaruhi pembentukan identifikasi kepartaian pada individu-individu yang lain. Setiap kelipatannya akan melahirkan suatu dukungan yang luar biasa. Praktek seperti ini harus dimulai di ranah publik yang paling bawah (*grass roots*).

Kelima, *at last but not least*, pendidikan politik bagi masyarakat menjadi suatu keniscayaan. Bukanlah suatu bentuk kampanye terselubung yang dilakukan partai politik akan tetapi suatu keharusan dalam menjalankan fungsi pendidikan politik yang diperankan oleh partai politik. Partai politik bisa memanfaatkan jalur ini dengan cara simpatik

¹³ Sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat budaya paternalistis itu masih ada dan sangat mengakar dalam masyarakat sehingga adakalanya orientasi dari pemilih bukan pada isu-isu kampanye dari suatu partai politik akan tetapi pada figur partai tersebut.

kepada masyarakat. Sebab, aktifitas ini akan melekat dalam keseharian masyarakat di tingkat bawah. Persoalannya adalah bagaimana partai politik menyusun strategi melalui media ini lebih kongkrit.

X. KESIMPULAN

Sebagai sebuah keharusan untuk memperoleh dukungan maksimal dalam pemilu 2004 mendatang, setiap partai politik harus berjuang maksimal kalau tidak mau partai politik mereka berkubur dengan sejarah. Yang perlu disadari oleh partai politik saat ini adalah terjadinya perubahan perilaku politik masyarakat di lapisan bawah sebagai sebuah konsekuensi pencerahan politik (*political enlightenment*) yang dilakukan oleh stakeholders seperti pemerintah, mahasiswa, NGO's dan seterusnya. Partai politik harus dapat menyesuaikan visi dan misi dengan perkembangan masyarakat. Meskipun sebagian dari masyarakat di lapisan bawah semisal nagari masih memiliki budaya politik subjektif, akan tetapi pergeseran menuju budaya politik partisipan sudah mulai kelihatan. Implikasinya jelas bahwa masyarakat semakin sadar politik.

Mobilisasi politik yang selama ini dilakukan partai politik tertentu pada setiap pemilu tidak akan mungkin lagi terjadi. Masyarakat pada tingkat bawah, karena proses interaksinya dengan lingkungannya, akan memiliki predisposisi yang bermuara kepada respons politik yang akan diberikannya (Greenstien, 1975) Respons itu akan positif diterima oleh suatu partai politik, apabila dalam proses pembentukan predisposisi tersebut di stimulasi oleh perilaku partai yang juga positif. Dan ini sangat bergantung pada partai menyiasati strateginya mendekati masyarakat.

Adalah satu hal yang sangat fenomenal dalam kehidupan masyarakat tentang kecenderungan perubahan dalam masyarakat kelas bawah. Konsekuensi dari perubahan ini secara teoritis akan melahirkan pemilih-pemilih yang ragu (*swing voters*) menjelang pemilu 2004 mendatang *swing voters* terus meningkat seiring dengan penilaiannya terhadap kegagalan pemerintah dalam menenuhi harapan-harapan mereka. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana partai politik mengambil kesempatan ini untuk meyakinkan mereka agar loyal dan mau memberikan kesetiiaannya pada partai politik tertentu. Inilah pekerjaan besar bagi *incumbent party* dalam hal ini PDI-P dan PPP mencari solusi guna mengobati kekecewaan pendukung fanatiknya.

XI. UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini bisa terlaksana berkat bantuan Dana Rutin Universitas Andalas tahun 2002. Untuk itu sepantasnyalah peneliti mengucapkan terima kasih pada Lembaga Penelitian Universitas Andalas yang telah memungkinkan penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga sepatutnya disampaikan pada pihak-pihak yang mendukung terlaksananya penelitian ini beberapa fungsionaris partai politik (P.Golkar, PDI-P, PPP, PAN, dan PBB). Juga pada masyarakat Nagari Gantung Ciri dan Nagari Koto Baru Kab. Solok. Dan akhirnya, kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu dalam laporan ini. Terima kasih.

XII. DAFTAR PUSTAKA

Converse, Philip E and Gregory B. Markus,
1984, "Plus Ca Change: The New CPS Election Study Panel" in Richard G. Niemi and
Herbert F. Weisberg (eds), *Controversies in Voting Behavior* (Washington:
Congressional Quarterly Inc)

Gaffar, Afan
1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka pelajar)

Haryanto,
1982, *Sistem Politik: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty)

Hakimy Dt. Rajo Penghulu, H. Idrus,
2001, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di
Minangkabau*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)

Imawan, Riswandha,
1998, *Membedah Politik Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka pelajar)

Kato, Tsuyoshi, (terj)
1989, *Nasab Ibu Dan Merantau: Tradisi Minangkabau yang Berterusan Di Indonesia*
(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka)

Klingemann, Hans Dieter et. al., (terj)
2000, *Partai, Kebijakan Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Niemi, Richard G. and Herbert F. Weisberg (eds),
1984, *Controversies In Voting Behavior* (Washington : Congressional Quarterly Inc)

Peraturan Daerah No.9 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Biro
Hukum dan Perundang-Undangan DPRD Sumatera Barat)

Robertson, David.
1976, *A Theory of Party competition*. (London: John Wiley & Sons)